

# ANALISI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NGAL KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018

## *ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN NGAL VILLAGE, UNGAR DISTRICT, KARIMUN DISTRICT IN 2018*

Heri Kurniawan <sup>1</sup>, Adji Suradji Muhammad <sup>2</sup>, Imam Yudhi Prastya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Jl. Raya Dompok, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau

Email: [manusiabiasa663@gmail.com](mailto:manusiabiasa663@gmail.com); [suradji@umrah.ac.id](mailto:suradji@umrah.ac.id); [yudhiimam@umrah.ac.id](mailto:yudhiimam@umrah.ac.id)

**Abstrak:** Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ngal Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun tahun 2018. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pada analisis pengelolaan ADD di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah di dapat dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD di Desa Ngal harus melibatkan tokoh masyarakat saat melakukan MusrebangDes untuk membahas pengelolaan ADD. Adapun dalam mendukung proses pengelolaan ADD Pemerintah Desa Ngal harus memperhatikan kebutuhan masyarakat melaikan keinginan masyarakat serta memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat agar pelaksanaan pengelolaan ADD dapat berjalan dengan baik. Selaian itu, Pemerintah Desa Ngal untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) harus melibatkan pemuda-pemuda asal daerah yang berpendidikan tinggi untuk membangun Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Pengelolaan, dan Alokasi Dana Desa

**Abstract:** *Analysis of Village Fund Allocation Management in Ngal Village, Ungar District, Karimun Regency in 2018. This study aims to identify and explain the management of Village Fund Allocation (ADD) in Ngal Village, Ungar District, Karimun Regency in 2018. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The research focus is on the analysis of ADD management in Ngal Village, Ungar District, Karimun Regency. The data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data that has been analyzed can be analyzed using steps including data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that ADD management in Ngal Village must involve community leaders when conducting the MusrebangDes to discuss ADD management. As for supporting the ADD management process, the Ngal Village Government must pay attention to the needs of the community, ignore the wishes of the community and pay attention to supporting and inhibiting factors so that the implementation of ADD management can run well. In addition, the Ngal Village Government to improve Human Resources (HR) must involve young people from highly educated areas to build Ngal Village, Ungar District, Karimun Regency.*

**Keyword:** *Public Policy, Management, and Village Fund Allocation*

## PENDAHULUAN

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah yang asalnya dari pemerintah

pusat. Hal ini karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa salah satunya pada pasal 18 yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Untuk menjalankan fungsi pemerintah desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang behadapan langsung dengan masyarakat. Pada saat ini, peran pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan desa.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup Sadu Wasistiono dalam Kusumo (2016:61) menyatakan bahwa "pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah". Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengarah kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasi dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada kepala desa yaitu dalam bentuk (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan dalam perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Desa Ngal merupakan salah satu desa

yang berada di Kecamatan Ungar dan mendapatkan ADD dari Pemerintah Kabupaten Karimun. Dengan adanya ADD perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desa dan ikut merealisasikannya.

Seperti di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun pengelolaan ADD masih terdapat permasalahan dibidang pembangunan tidak tepat sasaran atau tidak sesuai perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan tembok penahan tanah di Desa Ngal Pulau Propos yang masih belum selesai. Sebenarnya pembangunan tembok penahan tanah sudah termasuk ke dalam perencanaan ADD Desa Ngal Tahun 2018.

Ukuran tembok penahan tanah yang direncanakan pada saat MusrebangDes sepanjang 50 meter, tetapi yang terealisasi hanya 38 meter. Dilihat dari pembangunan persentase yang terealisasi hanya 73 persen dari hasil yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu pembangunan pelabuhan umum di Desa Ngal Pulau Propos juga tidak sesuai harapan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Ngal. Panjang pelabuhan tidak sesuai dengan hasil pada saat MusrebangDes. Ukuran pelabuhan pada saat hasil musrebang ialah 41 meter tetapi yang terealisasi hanya 35 meter dengan lebar pelabuhan 2 meter. Sehingga persentase pembangunan pelabuhan umum yang terealisasi hanya 75 persen dari hasil yang ditetapkan pada saat MusrebangDes. Hal ini dapat dilihat bahwa pelabuhan tidak lepas dari ujung pantai sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam menggunakan pelabuhan pada saat air surut. Maka hal ini harus dibenahi oleh pemerintah desa dan diperhatikan oleh berbagai pihak karena pelabuhan merupakan akses utama masyarakat untuk penyebrangan dari satu pulau ke pulau lainnya.

Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD merupakan proses awal dari pembenahan. Karena masyarakat bukan hanya menjadi objek juga mampu menjadi pelaku dalam pemerintah desa. Untuk mendapatkan pembangunan yang maksimal maka terdapat beberapa elemen yang berperan dalam pengelolaan ADD yaitu Perangkat Desa, Pemuda, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan program tersebut secara tertib, efektif dan efisien, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan ADD menurut The Liang Gie dalam Karimah, Saleh, & Wanusmawatie (2014) Administrasi keuangan diartikan sebagai suatu sub konsep atau tata keuangan sebagai suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu". Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh administrasi keuangan adalah pertanggungjawaban, efisiensi dan/atau efektivitas dalam pengadaan dan penggunaan dana.

Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kurangnya kerjasama dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Ngal menimbulkan ketidak merataan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa, seperti pembangunan tembok penahan tanah dan pembangunan pelabuhan umum. Potensi Sumber Daya

Alam (SDA) yang menunjang desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa seperti hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, sehingga Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas pendengar. Kemudian tahap pembahasan rencana penggunaan ADD ialah untuk program pembangunan desa dengan menggunakan anggaran ADD. Namun, yang dihadirkan hanya beberapa orang tertentu saja, sementara hasil dari pembahasan rencana pengelolaan ADD tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum.

## **METODE**

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011).

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Karena Desa Ngal merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ungar yang menerima Alokasi Dana Desa. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Adapun objek dalam

penelitian ini yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi literatur. Dan informan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Tokoh Masyarakat. Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah- langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Kurniawan (2014:10), adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen APBD dari Kabupaten Karimun yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai Kabupaten Karimun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Adapun Alokasi Dana Desa di Desa Ngal Kecamatan Ungar sebesar 10% dari APBD Kabupaten Karimun. Selanjutnya besaran ADD Desa Ngal, Kecamatan Ungar Tahun 2018 sejumlah Rp. 1.142.960.600 yang diperoleh dari APBD pemerintah Kabupaten Karimun yang dialokasikan untuk gaji aparatur pemerintah desa, operasional, insentif RT dan RW, penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Berikut merupakan data ADD tahun anggaran 2018 Desa Ngal Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

**Tabel 1.** Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Ngal Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun

<b>URAIAN</b>	<b>BESARAN ANGGARAN (RP.)</b>
<b>GAJI APARATUR PEMERINTAH DESA</b>	<b>290.718.000</b>
Gaji dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	290.718.000
<b>OPERASIONAL</b>	<b>257.049.150</b>
Pemerintah Desa	180.343.800
Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	76.705.350
<b>INSENTIF RT DAN RW</b>	<b>36.000.000</b>
Rukun Tetangga (RT)	24.000.000
Rukun Warga (RW)	12.000.000
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>298.757.050</b>
Rehabilitasi Kantor Desa Ngal dan Pengadaan Sarana Prasarana	258.510.050
Pengadaan buku administarsi dan regulasi Tentang Desa	15.247.000
Pemilihan Kepala Desa Ngal	25.000.000
<b>PEMBAGUNAN DESA</b>	<b>195.136.360</b>
Pengadaan Prasarana Masjid Jami' Al-Munawarah Desa Ngal	10.031.500
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Ngal	71.730.300
Pembangunan Pelabuhan Desa Ngal Pulau Propos	111.374.560
<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>52.934.640</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Rutinitas TP PKK Desa Ngal	20.516.640
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam (Isra' Miraj)	9.498.000
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam (Maulid Nabi Muhammad S.A.W)	9.498.000
Kegiatan Penyelenggaraan Munaqasah TPQ Desa Ngal	3.924.000
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam (Tahun Baru Hijriyah)	9.498.000
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>14.365.400</b>
Kegiatan Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan	14.365.400
<b>JUMLAH</b>	<b>1.142.960.600</b>

Sumber : Sekertaris Desa Ngal 2020

**Tabel 2.** Pencapaian Pembangunan Desa Ngal Dari Anggaran ADD Tahun 2018

URAIAN	BESARAN ANGGARAN (RP.)	TREALISASI (RP.)	TIDAK TREALISASI (RP.)	TREALISASI (%)	TIDAK TREALISASI (%)
Pengadaan Prasarana Masjid Jami' Al-Munawarah Desa Ngal	10.031.500	9.830.870	200.630	98 %	2 %
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Ngal	71.730.300	52.363.119	19.367.181	73 %	27 %
Pembangunan Pelabuhan Desa Ngal Pulau Propos	111.374.560	83.530.920	27.843.60	75 %	25 %
<b>Pembangunan Desa</b>	<b>195.136.360</b>	<b>89.762.725,6</b>	<b>105.373.634</b>	46 %	54 %

Sumber : Sekretaris Desa Ngal, 2020

Dari jumlah besaran ADD Desa Ngal Tahun 2018 dialokasikan untuk Pembangunan Desa sebesar Rp 195.136.360. Maka dapat dilihat bahwa ADD yang dialokasikan tersebut digunakan untuk Pengadaan Prasarana Masjid Jami' Al-Munawwarah Desa Ngal sebesar Rp. 10.031.500, Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Ngal sebesar Rp. 71.730.300, dan Pembangunan Pelabuhan Pulau Propos, Desa Ngal sebesar Rp. 111.374.560. Maka dapat dilihat pencapaian Pembangunan Desa dari anggaran ADD pada tahun 2018. Pada tahap Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Ngal keberhasilan yang terelisasi ialah 73 persen, dan Pembangunan Pelabuhan Desa Ngal Pulau Propos keberhasilan yang terealisasi ialah 75 persen. Dalam hal ini pemerintah desa harus lebih memperhatikan tahapan pengelolaan ADD sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola ADD Desa Ngal.

**a. Analisis Perencanaan (Planning) ADD di Desa Ngal Tahun 2018**

Perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan adalah cara mengalokasikan ADD dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan ADD Desa Ngal pemerintah Desa Ngal harus melakukan permohonan terlebih dahulu kepada pemerintah Kabupaten Karimun untuk memperoleh ADD yang disesuaikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan menggambarkan rencana apa saja yang harus ditetapkan pihak terkait seperti Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan masyarakat desa. Dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) dengan melibatkan BPD, dan tokoh

masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Namun perencanaan di Desa Ngal belum faktual dan realistis yang dapat dilihat dari perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Ngal tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk menilai perencanaan tersebut apakah bisa membawa perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa dalam melakukan pengelolaan ADD harus direncanakan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat karena sebuah perencanaan akan menjadi patokan dalam pengelolaan ADD agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan yang sesuai maka pengelolaan ADD di Desa Ngal akan berjalan secara struktural dan mempermudah tercapainya sebuah tujuan.

#### **b. Analisis Pengorganisasian (Organizing) ADD di Desa Ngal Tahun 2018**

Setelah ditetapkan rencana kegiatan yang dipertujukan untuk mencapai tujuan maka dibagi-bagi struktur prangkat desa berdasarkan dengan tugas masing-masing dan mendapatkan kekuasaan yang didelegasikan padanya dari atasannya. Pengorganisasian berkaitan dengan pihak-pihak mana yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Dari hasil wawancara peneliti bahwa pengorganisasian berjalan sebagaimana mestinya karena dilakukan dengan membagi pekerjaan, wewenang, tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini tidak mungkin keseluruhan aktivitas yang bermacam-macam tersebut hanya

dilakukan oleh Kepala Desa saja tentunya perlu melakukan pengorganisasian agar keseluruhan aktivitas yang direncanakan terealisasi.

Selain itu pemerintah Desa Ngal memiliki struktur pemerintahan yang lengkap sehingga masing-masing berkerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti yang disampaikan oleh George R. Terry, yang memberikan pengertian pengorganisasian adalah proses membangun kerja sama yang efektif di antara sejumlah orang agar supaya mereka dapat bekerja bersama-sama secara efisien dan mendapat kepuasan dalam melakukan tugas sesuai kondisi lingkungan yang ada dalam rangka mencapai tujuan.

#### **c. Analisis Pelaksanaan/Penggerakan (Actuating) ADD di Desa Ngal Tahun 2018**

Pada tahap perencanaan sudah di tetapkan beberapa yang termasuk kedalam pembangunan desa digunakan untuk Pengadaan Prasarana Masjid Jami' Al-Munawwarah Desa Ngal sebesar Rp. 10.031.500, Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Ngal sebesar Rp. 71.730.300, dengan melihat jumlah anggaran yang dialokasikan tentu harapan terbangunnya tembok penahan tanah sangat besar. Namun setelah dilihaat tembok penahan tanah tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Selain itu juga tembok penahan tanah tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat musrembang. Belum beberapa tahun tembok penahan tanah dengan panjang 38 Meter sudah mengalami keretakan.

Sementara itu permasalahan pada pelaksanaan tidak hanya pada pembangunan tembok penahan tanah. Namun juga pada pembangunan Pelabuhan Pulau Propos, Desa Ngal dengan anggaran sebesar Rp.111.374.560. Pada pelaksanaan pembangunan

pelabuhan pulau propos terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Padahal pelabuhan merupakan akses utama masyarakat untuk berkepergian dari Pulau Propos ke pulau lain.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan ADD di Desa Ngal bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Ngal belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari beberapa hal yang terjadi seperti:

- a. Terjadinya miss komunikasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat terkait pembangunan pelabuhan dan tembok penahan tanah sehingga tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai karena letak wilayah yang jauh dari pusat perbelanjaan sehingga sulit untuk mendapatkan material dalam melakukan pembangunan.
- c. Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan ADD terhadap apa yang telah direncanakan bersama pada saat Musrembang Desa sehingga persentase terealisasi masih belum mencapai 100 persen.

Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah Desa Ngal agar lebih berkomitmen, teliti dan cepat tanggap mencari solusi untuk mengatasi permasalahan dalam melakukan pelaksanaan ADD. Evaluasi merupakan penilaian sistematis dan objektif dari rencana, implementasi dan hasil dari suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung ataupun yang telah selesai. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses penentuan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan, program atau kegiatan yang diukur secara sistematis dan objektif dari rencana, pelaksanaan atau capaian. Dalam evaluasi pelaksanaan ADD di Desa Ngal maka dapat di lihat dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan

kualifikasi dan jumlah yang memadai akan menentukan pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari ADD yang dilaksanakan di Desa Ngal belum memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan yang ada di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun.

#### **d. Analisis Pengawasan (*Controlling*) Alokasi Dana Desa di Desa Ngal Tahun 2018**

Tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal sejauh ini telah memberikan ruang terbuka pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan pada pembangunan tembok penahan tanah yang dirasa kurang tepat sasaran kepada pemerintahan Desa Ngal. Keterbukaan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan cerminan Pemerintah Desa Ngal memberdayakan masyarakat desanya dalam tahap pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan ADD. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi ujung tombak agar pelaksanaan penggunaan ADD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa serta masyarakat pada tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal, pengawasan dilakukan langsung oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan termasuk penggunaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahunnya yaitu berupa pelaporan tiap akhir tahun atau sering disebut dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Selain itu saran dan masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa untuk mencari solusi dari permasalahan yang menjadi keluh-kesah. Oleh karena itu adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat mampu meminimalisirkan permasalahan pada tahap pengawasan.

#### **e. Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Tahun 2018**

Faktor Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Dapat di liat dari partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai.

##### *1. Partisipasi masyarakat*

Partisipasi Masyarakat Desa Ngal dalam Pengelolaan ADD terlihat pada masyarakat memberikan aspirasi ditahapan perencanaan. Pada musrembangdes, masyarakat berperan aktif mengemukakan pendapatnya mengenai kebutuhan masyarakat baik di tingkat Dusun maupun di tingkat Desa untuk membangun Desa Ngal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini masih kurangnya sinergi antar Pemerintah Desa dan masyarakat. Pemerintah Desa Ngal harus lah bersifat terbuka kepada masyarakat baik itu untuk pembangunan Desa Ngal, maupun untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ngal itu sendiri.

Sedangkan masyarakat harus lebih memperhatikan bagaimana kinerja Pemerintah Desa. Sehingga apa yang menjadi kekurangan Pemerintah Desa dalam segala urusan untuk kesejahteraan Desa Ngal segera diperbaiki. Selain itu masyarakat pun tidak boleh mengedepankan sikap apatis. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan partisipasi adalah meningkatnya rasa saling mengerti dan saling membantu antara sesama terutama dalam setiap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ngal.

##### *2. Sarana dan Prasarana*

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha dan pembangunan. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kesejahteraan sebuah desa khususnya wilayah kepulauan. Oleh sebab itu pemerintah desa harus segera memperhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apa lagi berkaitan dengan pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa sarana dan prasarana seperti pelabuhan layak pakai, transportasi laut untuk umum masih tergolong minim sehingga menjadi kesulitan dalam beraktivitas. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun dalam membuat kebijakan yang dapat mengoptimalkan kebutuhan masyarakat sehingga pencapaian dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

#### **f. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun Tahun 2018**

Adapun faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun yaitu :

##### *1. Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam proses Pengelolaan ADD. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintah adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan pemerintah desa serta ibu PKK bahwa SDM sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa. Sumber daya manusia (SDM) perlu dikelola secara profesional agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dengan tuntutan dan kemampuan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

## 2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. Begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang melalui komunikasi. Dari hasil wawancara antara peneliti dengan Pemerintah desa dan tokoh adat dalam hal ini Pemerintah Desa hendaknya membuka ruang untuk berkomunikasi. Agar masyarakat pun mau berpartisipasi disetiap kegiatan atau pembangunan di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Di sisi lain masyarakat juga harus terbuka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifatnya membangun desa. Serta masyarakat juga tidak boleh bersikap apatis, agar antara pemerintah desa dengan masyarakat terjalin silaturahmi yang baik yang berdampak positif untuk mewujudkan Desa Ngal yang sejahtera.

Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasional. Agar terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun maka pemerintah Desa Ngal juga harus membuat kebijakan sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (4) yang menerangkan bahwa penetapan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomis peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (4) Pemerintah Desa harus mampu memainkan peran sebagai pendorong atau penggerak guna untuk peningkatan kualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat meminta kepada pemerintah Desa Ngal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Ngal. Karena ini sangat penting dalam mempermudah masyarakat dan menunjang Sumber Daya Manusia (SDM) serta ekonomi di Desa Ngal sendiri.

Pembangunan di Desa Ngal bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mensejahterakan masyarakat Desa Ngal. Masyarakat di Desa Ngal merupakan potensi Sumber

Daya Manusia (SDM) yang memiliki peranan ganda yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan karena sebagai masyarakat di Desa Ngal dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan masyarakat di Desa Ngal memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu dalam proses pembangunan Desa. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, peneliti menggunakan teori pengelolaan yang menjelaskan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, peorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan pengelolaan ADD di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun sudah berjalan sesuai dengan empat indikator yang dikemukakan oleh George R. Terry untuk mewujudkan akuntabilitas, namun terdapat permasalahan yang terjadi pada indikator perencanaan dan pelaksanaan. Pada indikator perencanaan masih belum memenuhi syarat keberhasilan sebuah perencanaan. Karena perencanaan di Desa Ngal belum faktual dan realistis yang dapat dilihat dari perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Ngal tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang dihadapi masyarakat. Sedangkan pada indikator pelaksanaan terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dari pelaksanaan. Namun dalam hal ini pelaksanaan pada pengelolaan ADD di Desa Ngal masih belum memenuhi faktor-faktor tersebut sehingga terjadinya miss komunikasi, kurangnya komitmen dalam pelaksanaan ADD

terhadap apa yang telah direncanakan bersama pada saat Musrembang Desa serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Desa Ngal.

Selain itu peneliti juga menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengelolaan ADD di Desa Ngal, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Adapun faktor pendukungnya ialah adanya partisipasi masyarakat serta sarana dan prasarana yang memadai. Namun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di Desa Ngal masih belum bisa dikatakan ideal karena Pemerintah Desa yang kurang terbuka menyebabkan masyarakat bersikap apatis. Sama halnya dengan sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Desa Ngal dapat mempersulit pengelolaan ADD. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat ialah sumber daya manusia yang berkualitas karena di Desa Ngal sendiri masih tergolong kurang hal ini disebabkan oleh orang-orang yang selesai menempuh pendidikan tinggi tidak kembali ke desa untuk mengabdikan melainkan berkerja dirantau. Selain itu komunikasi juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan ADD di Desa Ngal karena kurang terbukanya Pemerintah Desa dengan masyarakat sehingga masyarakat memilih untuk bersikap apatis.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu pada pengelolaan ADD di Desa Ngal terdapat faktor pendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana serta faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat dan komunikasi yang harus Pemerintah Desa perhatikan. Sehingga beberapa tahap pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngal belum terlaksana

secara efektif dan efisien. Adapun beberapa permasalahan yang terdapat pada tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) musrembang yang dilakukan Pemerintah Desa Ngal hanya melibatkan masyarakat tertentu saja. Sehingga menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pada tahap pengorganisasian sudah berjalan dengan intensif yang dapat dilihat dari pemerintah Desa Ngal memiliki struktur pemerintahan yang lengkap sehingga masing-masing berkerjasama untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Namun pada tahap pelaksanaan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pelaksanaan pembangunan pelabuhan pulau propos terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat sulit melakukan aktifitas karena pelabuhan adalah akses utama bagi masyarakat untuk berpergian antar pulau. Begitu juga pada pembangunan Tembok Penahan Tanah, ukuran pada pelaksanaan tidak sesuai kebutuhan masyarakat pada saat hasil MusrembangDes.
4. Pada tahap pengawasan Pemerintah Desa telah memberikan ruang terbuka pada masyarakat untuk menyampaikan hal yang menjadi keluhan pada pembangunan desa. Sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat dijadikan evaluasi Pemerintah Desa pada pengelolaan ADD di Desa Ngal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, K. (2016) *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Enos, P. *et al.* (2018) 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember', *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), pp. 52– 66. doi: 10.17509/jrak.v2i3.6598.
- Erfiana, N. (2018) *Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017)*.
- Hardiansyah (2013) 'Pengelolaan Bank Sampah di Kota Tanjungpinang', *Tesis*, 53(9), pp. 1–20. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Kurniawan, B. T. (2014) 'Penanaman pendidikan karakter religius melalui program pagi sekolah', *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uviversitas Muhammadiyah Surakarta*, pp. 1–12.
- Kusumo, H. (2016) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala', *Katalogis*, 4(9), pp. 61–72.
- Moleong (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rodaskarya.
- Ningsih, B. (2017) *Kontribusi alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat pinggiran sungai di desa rangsang kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putra, P. E. (2018) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar', 5(1), pp. 1–14.
- Sulfemi, W. B. (2019) *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bogor.
- Wasistiono, S. (2007) *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokus Media, Bandung.

- Hindun (2015) '*Perencanaan Strtegis dan Prilaku Manajerial Lembaga-Lembaga Pendidikan*', *Jurnal Kependidikan Islam*, pp. 112–128.
- Karimah, F., Saleh, C. and Wanusmawatie, I. (2014) '*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), pp. 597–602.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N. and Wachid, A. (2017) '*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, *Universitas Brawijaya, Malang*, 3(1), pp. 111–117.